

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

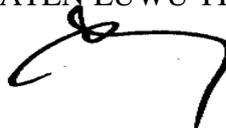
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. RENJA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

RENJA ini selain sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggung jawabkan baik dilapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan RENJA ini.

Malili, Maret 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR



ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.19770422 199511 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
 TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (harus ada penyesuaian terkait program dan kegiatan).....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

1. Tabel 01 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA perangkat daerah dan pencapaian RENSTRA perangkat daerah s/d tahun 2019	11
2. Tabel 02 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur	20
3. Tabel 03 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021	26
4. Tabel 04 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021	42
5. Tabel 05 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021	48
6. Tabel 06 Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada akhir Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dimana penyusunan RENJA tersebut merupakan amanat dari Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

RENJA Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

RENJA Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Luwu Timur dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selanjutnya RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang

menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RENJA Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rancangan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur TA. 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun

- 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab.Luwu Timur 2005-2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Tahun 2017;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 26. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019);
 28. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dapat menerangkan perencanaan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2022.

Penyusunan RENJA ini juga dimaksudkan untuk menentukan tolak ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan RENJA dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan RENSTRA yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 11 program dan 38 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.510.432.371,- atau sebesar 98,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.618.217.680,- yang terdiri atas belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp. 2.503.902.087,- atau sebesar 99,96% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.504.836.500,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.006.530.284,- atau sebesar 97,91% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.113.381.180,- Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Bapedalda berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup sehingga ada perubahan terkait program persampahan yang dulunya merupakan tugas dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman akan tetapi sejak tahun 2018 menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup.

Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
5. Program Penataan Lingkungan Hidup.
6. Program Pernaatan Lingkungan Hidup.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

TABEL 01

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%							
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%							
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	92,35	6	100	100	3	3	89,33

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	-	-	-	-	2	2	81.58
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	-	-	-	-	2	2	100
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	-	-	-	-	10	10	92.57
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%							
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	26 Orang	-	-	-	-	26	26	94.86
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	94.9	2	100	100	18	18	99.58
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100%							
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	-	-	-	-	4	4	93.76
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%							
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	-	-	-	-	12	12	99.38

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	-	-	-	2	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	10.91	3	98.30	98.30	4	4	83.68
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	-	-	-	-	3	3	99.68
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	-	-	-	-	12	12	99.64
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	-	-	-	-	5	3	91.95
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	45.99	1440	92.26	92.26	1440	1440	75.00
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	202 Orang	-	-	-	-	202	202	100
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	187 Kali	89.01	41	99.93		187	187	96.25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%							

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	-	-	-	-	2	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	-	-	-	-	2	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	-	-	-	-	2	2	99.69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	29.17	3000	100	100	1000	1000	97.61
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	54.14	36	82.23	82.23	36	36	74.36
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	-	-	-	-	4	4	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%							
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	80.47	8	74.15	74.15	8	8	94.86
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 Unit	-	-	-	-	36	36	100

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	76.41	2	100	100	2	2	99.56
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1%							
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	-	-	-	-	4	4	95.75
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	-	-	-	-	176	176	92.29
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	-	37	94.47	94.47	37	37	99.29
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terciptanya ruang terbuka hijau	5 RTH							
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan	0 Dokumen							
	Pengelolaan ruang terbuka	Jumlah RTH yang	5 RTH	4.83	8	98.47	98.47	5	5	63.09

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	hijau	dipelihara								
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30 Usaha							
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	-						
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	-	-	-	-	30	30	92.98
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50%							
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Persentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	22 Usaha/ Kegiatan	-						
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	-	-	-	-	10	10	93.11

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	-	-	-	-	30	30	79.66
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	-	-	-	-	2	2	99.12
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional	3 MHA							
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdata	16 MHA							
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	16.59	3	81.46	81.46	3	3	88.41
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan							

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan							
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	-	-	-	-	1	1	92.74
	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%							
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah							
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	-	-	-	-	2	2	84.71
	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan	80%							
	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	80%							

2Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga persampahan	21500 Ton	-	-	-	-	21500	21500	99.92
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	-	-	-	-	12	12	97.85
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	-	-	-	-	127	127	91.94

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi dibidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Lingkungan Hidup; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam RENSTRA Tahun 2016-2021. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL 02
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI SELATAN KAB. LUWU TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16
1	Indeks kualitas air	30%	61.25%	n.a	46.25%	50.00%	53.80%	57.50%	n.a	46.25%	50%	36.40%	89.19%	27.00	27.50	
2	Indeks kualitas udara	30%	53.16%	n.a	50.08%	50.90%	51.62%	52.39%	n.a	50.08%	50.90%	97.79%	98.40%	29.50	29.55	
3	Indeks tutupan Lahan	40%	70.24%	n.a	70.24%	70.24%	70.24%	70.24%	n.a	70.24%	70.24%	76.48%	76.48%	30.50	30.50	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	80	25	30	50	70	75	25.28	10.97	72.65	60.54	-	60.55	60.56	

Keterangan:

Berdasarkan standar IKLH Kabupaten = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITH

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air dan Udara mengacu pada baku mutu/standar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien).

Dapat dijelaskan pada tabel 02 terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdapat realisasi capaian dari tahun 2016-2020 pada indeks kualitas air mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan nilai 89.19%. Indeks kualitas udara terdapat realisasi capaian dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada Indeks Tutupan Hutan mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada Nilai sapik Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 s.d 2019. Sedangkan pada tahun 2020 belum diketahui karena masih proses penilaian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sesuai tupoksinya melaksanakan pelayanan publik terdiri dari;

1. Pelayanan perizinan lingkungan dan perizinan LB3/Medis

Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi terkait izin lingkungan dan rekomendasi perizinan LB3/Medis serta melakukan pengawasan terkait dokumen lingkungan.

2. Pelayanan kebersihan dan persampahan

Pelayanan Kebersihan dan persampahan telah dikelola oleh UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan sejak Tahun 2019 dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak 129 orang terdiri dari : 3 Pengawas, 2 operator alat berat, 1 operator pencacah sampah, 16 sopir truk sampah, 10 operator pengemudi motor sampah, 34 kru mobil, 1 satpam TPA Ussu, 3 Pengelola TPA Ussu, 10 Tenaga pembabat rumput, 15 tenaga pembersih drainase, 33 tenaga kebersihan dan pertamanan, 1 tenaga administrasi persampahan.

3. Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Pelayanan laboratorium lingkungan dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sejak Tahun 2019, dimana Laboratorium Lingkungan ini dapat memeriksa 8 parameter air yaitu; pH, TSS, TDS, DHL, Sulfat, DO, BOD dan Klorida.

Yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

- Pelayanan perizinan lingkungan dan perizinan LB3/Medis
 - Kualitas dan kuantitas yang belum memadai.
 - Tenaga PPLHD sesuai target KP.1 sebanyak 5 orang baru terealisasi 1 orang yang belum melaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Pengawas.
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait.
 - Adanya musibah bencana alam.

- Pelayanan kebersihan dan persampahan
 - Jumlah tenaga kebersihan yang ada belum dapat mencakupi sebelas kecamatan karena hanya dikelola oleh satu UPTD yang berpusat di ibukota kabupaten.
 - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan.
 - Sampai tahun 2020 jumlah truk sampah baru mencakup untuk tujuh kecamatan sehingga masih kekurangan 4 kecamatan
 - Belum adanya tenaga penebang pohon dan penata taman untuk penanganan ruang terbuka hijau.
 - Sarana dan prasarana persampahan sejak tahun 2021 menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Pelayanan Laboratorium Lingkungan
 - Belum disahkan perda yang mengatur retribusi pelayanan laboratorium lingkungan.
 - Laboratorium lingkungan hanya dapat memeriksa 8 parameter kualitas air sehingga kedepannya masih dibutuhkan pengembangan parameter lainnya termasuk parameter kualitas udara dan parameter kualitas tanah.
 - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup.
- b. Faktor Pendorong :
 - Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah.
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Dukungan kebijakan pusat dalam penyelenggaraan dan pembangunan dibidang lingkungan hidup.
- Dukungan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merespon kebijakan pusat dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang lingkungan hidup
- Kemajuan IPTEK dibidang penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun isu penting terhadap penyelenggaraan penanganan covid 19 yang terkait dengan tupoksi Dinas lingkungan hidup Kabupaten luwu timur tahun 2020 penanganan dan pengawasan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) selama dan pasca covid 19, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan sektor terkait. Diharapkan agar masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan penanganan limbah medis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan serta tantangan pembangunan, isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam RPJMD Tahun 2016-2021 akan menjadi isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan RENJA dengan kebutuhan tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

TABEL 03
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,651,307,376	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,651,307,376	
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	57,321,000	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	57,321,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	32,925,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	32,925,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,488,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,488,000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,288,000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,288,000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	17,620,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	17,620,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,985,767,453	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,985,767,453	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 Orang	2,934,427,453	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 Orang	2,934,427,453	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	51,340,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	51,340,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100%	16,164,950	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100%	16,164,950	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	16,164,950	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	16,164,950	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	66,462,870	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	66,462,870	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	17,522,870	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	17,522,870	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25,340,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25,340,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	23,600,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	23,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	200,843,315	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	200,843,315	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315	
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	5,135,000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	5,135,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	8,446,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	8,446,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	4,800,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	4,800,000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 Orang	8,820,000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 Orang	8,820,000	
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	171 Kali	172,294,000	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	171 Kali	172,294,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	107,810,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	107,810,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	50,750,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	50,750,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	37,400,000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	37,400,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	19,660,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	19,660,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	138,838,288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	138,838,288	
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,498,520	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,498,520	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	78,099,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	78,099,500	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	12,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	12,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	19,999,500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	19,999,500	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1%	451,117,488	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1%	451,117,488	
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	392,883,488	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	392,883,488	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut		Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	105,360,450	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut		Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	105,360,450	
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	287,523,038	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	287,523,038	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Terciptanya ruang terbuka hijau	5 RTH	74,994,400	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Terciptanya ruang terbuka hijau	5 RTH	74,994,400	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

						Hayati					
	Pengelolaan Keeneragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan	0 Dokumen	74,994,400	Pengelolaan Keeneragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan	0 Dokumen	74,994,400	
	Pengelolaan ruang terbuka hijau		Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	74,994,400	Pengelolaan ruang terbuka hijau		Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	74,994,400	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	
	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan		Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

						perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50%	71,798,240	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50%	71,798,240	
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota		Pesentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota		Pesentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,256,465	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,256,465	
	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional	3 MHA	107,829,790	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional	3 MHA	107,829,790	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terdata	16 MHA	107,829,790	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terdata	16 MHA	107,829,790	
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	107,829,790	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	107,829,790	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	50,615,010	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	50,615,010	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	
Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan		Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%	10,414,000	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan		Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%	10,414,000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	
	Program Pengelolaan Persampahan		Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan	80%	3,442,954,200	Program Pengelolaan Persampahan		Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan	80%	3,442,954,200	
	Pengelolaan sampah		Persentase sampah yang terkelola	80%	3,442,954,200	Pengelolaan sampah		Persentase sampah yang terkelola	80%	3,442,954,200	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,290,839,200	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,290,839,200	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	125,445,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	125,445,000	
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	26,670,000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	26,670,000	
	Total				7,893,430,504	Total				7,893,430,504	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan RENJA perangkat daerah 2022 mengakomodir program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi dinas lingkungan hidup.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dengan tema *“Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yng berkualitas”*.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan pembangunan wilayah;
4. Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci terukur dan dapat dicapai.

Visi Misi Kab Luwu Timur Tahun 2021 s/d 2026 adalah:

Visi : “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Misi Kabupaten Luwu Timur yang menyangkut Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup, adalah Misi 3:

“Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas”.

Dengan misi ini dimaksudkan agar infrastruktur daerah dalam berbagai sector mengalami perkembangan yang lebih memadai dihadapan terakses sampai pada daerah terisolasi. Disamping juga tercipta kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsive bencana. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya volume dan kualitas jalan/jembatan, meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan di sector pertanian, perindustrian, jasa, pariwisata, dan telekomunikasi, serta meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumberdaya air.

Selain itu, juga ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang berkualitas dan responsive bencana berupa pengendalian sumberdaya hutan, sungai dan wilayah pesisir, serta tertata dan bersihnya wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan, tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat, dan area public (*public space*).

Arah Kebijakan Misi 3 : Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas dengan arah kebijakan:

- Meningkatkan Kebersihan kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Adapun Program Prioritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup;

- a. Lingkungan dan tata ruang ; Pengembangan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Sosial Budaya ; Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA.

Sesuai visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, maka tujuan pelaksanaan RENJA adalah “Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup”.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya indeks kualitas air, indek kualitas udara dan tutupan lahan
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 04

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022
Misi 3 : Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-	IKLHD	Point	87.55
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air , Udara dan Tutupan lahan	Indeks Kualitas air	Point	27.50
		Indeks Kualitas udara	Point	29.55
		Indeks tutupan Lahan	Point	30.50
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	60.56

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

- a. Sasaran : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan hutan.
 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - 1.1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
 - 1.1.1 Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut;
 - 1.1.2 Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ Kota.
 - 1.2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan:
 - 1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi;
 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan kegiatan;
 - 2.1 Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan;
 - 2.1.1 Pengelolaan ruang terbuka hijau;
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan Kegiatan;
 - 3.1 Penyimpanan sementara Limbah B3; Sub Kegiatan;
 - 3.1.1 Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan

sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan Kegiatan;
 - 4.1 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota, Sub Kegiatan;
 - 4.1.1 Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH;
 - 4.1.2 Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - 4.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH;
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dengan Kegiatan;
 - 5.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, Sub Kegiatan;
 - 5.1.1 Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH;
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan Kegiatan;
 - 6.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan;

- 6.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Program Penanganan Pengaduan Masalah, dengan Kegiatan;
 - 7.1 Lingkungan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan;
 - 7.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- 8. Program Pengelolaan Persampahan, dengan Kegiatan;
 - 8.1 Pengelolaan sampah, Sub Kegiatan;
 - 8.1.1 Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota;
 - 8.1.2 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - 8.1.3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- b. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas Lingkungan Hidup
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan;
 - 1.1. Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 1.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - 1.1.3 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.1.4 Evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan;

- 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 1.2.2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.3.1 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - 1.5.2 Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 1.5.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 1.5.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 1.5.5 Fasilitasi kunjungan tamu;
 - 1.5.6 Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel;
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.7.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1.7.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan;
 - 1.8.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.8.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 melaksanakan 9 program 17 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7,893,430,504,- dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 05

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2021 (N)					Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2022 (N)	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,648,997,376	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	3,648,997,376		100%	3,648,997,376
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	57,321,000	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	57,321,000		100%	57,321,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	32,925,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	32,925,000		3 Dokumen	32,925,000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,488,000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5,488,000		2 Dokumen	5,488,000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,288,000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1,288,000		2 Dokumen	1,288,000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	17,620,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	17,620,000		10 Dokumen	17,620,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,985,767,453	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,985,767,453		100%	2,985,767,453
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 Orang	2,934,427,453	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	26 Orang	2,934,427,453		26 Orang	2,934,427,453

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	51,340,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	51,340,000		18 Dokumen	51,340,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100%	16,164,950	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	100%	16,164,950		100%	16,164,950
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	16,164,950	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	16,164,950		4 Dokumen	16,164,950
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	66,462,870	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	66,462,870		100%	66,462,870
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	17,522,870	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	17,522,870		12 Dokumen	17,522,870

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25,340,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25,340,000		2 Orang	25,340,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan	SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	23,600,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan	SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	23,600,000		4 Orang	23,600,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	200,843,315	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	200,843,315		100%	200,843,315
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	1,348,315		3 Jenis	1,348,315
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	5,135,000	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	5,135,000		12 Jenis	5,135,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	8,446,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	8,446,000		5 Jenis	8,446,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	4,800,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksampler	4,800,000		1440 Eksampler	4,800,000
	Fasilitasi kunjungan tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 Orang	8,820,000	Fasilitasi kunjungan tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 Orang	8,820,000		196 Orang	8,820,000
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	171 Kali	172,294,000	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	171 Kali	172,294,000		171 Kali	172,294,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	107,810,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	107,810,000		100%	107,810,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	50,750,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	50,750,000		2 Unit	50,750,000
	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	37,400,000	Pengadaan Mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	12 Unit	37,400,000		12 Unit	37,400,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	19,660,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	19,660,000		2 Unit	19,660,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	138,838,288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	138,838,288		100%	138,838,288
	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,498,520	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	1,498,520		1000 Surat	1,498,520
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	85,139,768		36 Rekening	85,139,768
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	52,200,000		4 Orang	52,200,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	75,789,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	75,789,500		100%	75,789,500

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	46,100,000		8 Unit	46,100,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	12,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit	12,000,000		32 Unit	12,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	17,689,500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	17,689,500		2 Unit	17,689,500
Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	SKPD	Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1%	451,117,488	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	SKPD	Berkurangnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1%	451,117,488		1%	451,117,488
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	392,883,488	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen	392,883,488		4 Dokumen	392,883,488

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	SKPD	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	105,360,450	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	SKPD	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	105,360,450		4 Dokumen	105,360,450
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	287,523,038	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	287,523,038		176 Laporan	287,523,038
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000		37 Ha	58,234,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	SKPD	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	58,234,000		37 Ha	58,234,000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	SKPD	Terciptanya ruang terbuka hijau	5 RTH	74,994,400	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	SKPD	Terciptanya ruang terbuka hijau	5 RTH	74,994,400		5 RTH	74,994,400

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota	SKPD	Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan	0 Dokumen	74,994,400	Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota	SKPD	Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang dihasilkan	0 Dokumen	74,994,400		0 Dokumen	74,994,400
	Pengelolaan ruang terbuka hijau	SKPD	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	74,994,400	Pengelolaan ruang terbuka hijau	SKPD	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	74,994,400		5 RTH	74,994,400
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000		30 Usaha	32,400,000
	Penyimpanan sementara Limbah B3	SKPD	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Penyimpanan sementara Limbah B3	SKPD	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	30 Usaha	32,400,000		30 Usaha	32,400,000
	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	32,400,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	SKPD	Jumlah Penghasil Limbah B3/ medis yang diawasi	30 Usaha	32,400,000		30 Usaha	32,400,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	elektronik					elektronik							
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	SKPD	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50%	71,798,240	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	SKPD	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50%	71,798,240		50%	71,798,240
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	SKPD	Persentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	SKPD	Persentase usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240		22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,256,465	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	10 usaha/ Kegiatan	16,256,465		10 usaha/ Kegiatan	16,256,465
	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465		30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	SKPD	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310		2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan	SKPD	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional	3 MHA	107,829,790	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan	SKPD	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional	3 MHA	107,829,790		3 MHA	107,829,790

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	PPLH					PPLH							
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah MHA yang terdata	16 MHA	107,829,790	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah MHA yang terdata	16 MHA	107,829,790		16 MHA	107,829,790
	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	107,829,790	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	SKPD	Jumlah data/ Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	107,829,790		3 MHA	107,829,790

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	SKPD	Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	50,615,010	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	SKPD	Terlaksananya pemberi penghargaan lingkungan hidup	1 Penghargaan	50,615,010		1 Penghargaan	50,615,010
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010		1 Penghargaan	50,615,010
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah Penghargaan yang diterima	1 Penghargaan	50,615,010		1 Penghargaan	50,615,010
	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan	SKPD	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%	10,414,000	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan	SKPD	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%	10,414,000		50%	10,414,000

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	SKPD	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000		2 Masalah	10,414,000
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	SKPD	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	SKPD	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	10,414,000		2 Masalah	10,414,000
	Program Pengelolaan Persampahan	SKPD	Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan	80%	3,414,954,200	Program Pengelolaan Persampahan	SKPD	Tingkat pengerjaan kinerja pengelolaan persampahan	80%	3,414,954,200		80%	3,414,954,200
	Pengelolaan sampah	SKPD	Persentase sampah yang terkelola	80%	3,414,954,200	Pengelolaan sampah	SKPD	Persentase sampah yang terkelola	80%	3,414,954,200		80%	3,414,954,200

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,290,839,200	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah tenaga persapahan	129 Orang	3,290,839,200		129 Orang	3,290,839,200
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	SKPD	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	97,445,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	SKPD	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara	13 Jenis	97,445,000		13 Jenis	97,445,000
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	SKPD	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	26,670,000	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	SKPD	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank Sampah	26,670,000		127 Bank Sampah	26,670,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup direncanakan melaksanakan 9 program, 17 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7,830,720,504,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan RENJA Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 06

**ALOKASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3,648,997,376	PAD
1.1	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	57,321,000	PAD
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	32,925,000	PAD
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,488,000	PAD
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,288,000	PAD
1.1.4	Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	17,620,000	PAD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,985,767,453	PAD
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang	2,934,427,453	PAD
1.2.1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Dokumen	51,340,000	PAD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	16,164,950	PAD
1.3.1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	16,164,950	PAD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66,462,870	PAD

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	17,522,870	PAD
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	25,340,000	PAD
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	23,600,000	PAD
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	200,843,315	PAD
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 Jenis	1,348,315	PAD
1.5.2	Penyediaan bahan logistik kantor	12 Jenis	5,135,000	PAD
1.5.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	8,446,000	PAD
1.5.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1440 Eksampler	4,800,000	PAD
1.5.5	Fasilitasi kunjungan tamu	196 Orang	8,820,000	PAD
1.5.6	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	171 Kali	172,294,000	PAD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	107,810,000	PAD
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	50,750,000	PAD
1.6.2	Pengadaan Mebel	12 Unit	37,400,000	PAD
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	19,660,000	PAD
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138,838,288	PAD
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1000 Surat	1,498,520	PAD
1.7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Rekening	85,139,768	PAD
1.7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Orang	52,200,000	PAD
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	75,789,500	PAD
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	8 Unit	46,100,000	PAD
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	12,000,000	PAD
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	17,689,500	PAD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1%	451,117,488	PAD
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4 Dokumen	392,883,488	PAD

2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	4 Dokumen	105,360,450	PAD
2.1.2	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	176 Laporan	287,523,038	PAD
2.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	37 Ha	58,234,000	PAD
2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	37 Ha	58,234,000	PAD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5 RTH	74,994,400	PAD
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	74,994,400	PAD
3.1.1	Pengelolaan ruang terbuka hijau	5 RTH	74,994,400	PAD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	30 Usaha	32,400,000	PAD
4.1	Penyimpanan sementara Limbah B3	30 Usaha	32,400,000	PAD
4.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	30 Usaha	32,400,000	PAD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50%	71,798,240	PAD
5.1	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	22 Usaha/ Kegiatan	71,798,240	PAD
5.1.1	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	10 usaha/ Kegiatan	16,256,465	PAD
5.1.2	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	30 Usaha/ Kegiatan	20,282,465	PAD
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	2 Usaha/ Kegiatan	35,259,310	PAD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	3 MHA	107,829,790	PAD

6.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	16 MHA	107,829,790	PAD
6.1.1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3 MHA	107,829,790	PAD
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Penghargaan	50,615,010	PAD
7.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Penghargaan	50,615,010	PAD
7.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Penghargaan	50,615,010	PAD
8	Program Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan	50%	10,414,000	PAD
8.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	2 Masalah	10,414,000	PAD
8.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	2 Masalah	10,414,000	PAD
9	Program Pengelolaan Persampahan	80%	3,414,954,200	PAD
9.1	Pengelolaan sampah	80%	3,414,954,200	PAD
9.1.1	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	129 Orang	3,290,839,200	PAD
9.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	13 Jenis	97,445,000	PAD
9.1.3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	127 Bank Sampah	26,670,000	PAD
	Total		7,863,120,504	PAD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 telah berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dimana RENJA Tahun 2022 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

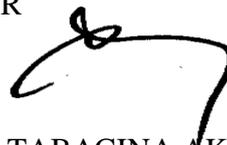
RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.

Dengan adanya RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur diharapkan agar seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan tak kalah pentingnya tetap berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata semoga RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Februari 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR



ANDI TABACINA AKHMAD.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19770422 199511 2 002

